ARTIKEL

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh:

EVA SULISTYORINI

11.1.02.01.0134

Dibimbingoleh :

1. **Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA, ACPA.**
2. **Badrus Zaman, S.E.,M.Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURATPERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap	:Eva sulistyorin
NPM	:11.1.02.01.0134
Telepun/HP	:085 646 640 522
Alamat Surel (Email)	:erini84@yahoo.co.id
Judul Artikel	:Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur
Fakultas – Program Studi	:Ekonomi-Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	:Universitas Nusantara Pgri Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	:jl. KH. Ahmad Dahlan No.77, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur 64112

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri,26 januari 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA, ACPA NIDN : 0713026101	Badrus Zaman, M.Ak NIDN: 0730036503	Eva sulistyorini NPM:11.1.02.01.0134

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Eva sulistyorini
11.1.02.01.0134
Ekonomi - Akuntansi
Erini84@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing
1. Drs. Ec. Sugeng, Ak., MM., M.Ak., CA, ACPA.
2. Badrus Zaman, S.E.,M.Ak.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Eva Sulistyorini: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Skripsi Akuntansi. 2017.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi,PAD, DAU, Belanja Modal.

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini. Fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pengembangan. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah mengubah komposisi belanja yang dimana selama ini belanja daerah dialokasikan ke dalam belanja operasi yang nyatanya kurang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016 yang berjumlah 38 daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampel* yang kemudian didapatkan 36 sampel perusahaan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan uji t, Uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal,Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal,Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, berpengaruh signifikan terhadap Belaja Modal.*Adjusted* R^2 sebesar 0.820 yang berarti bahwa 82%yang artinya bahwa semua variabel independen mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 18%.

ISI ARTIKEL

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah yan diemban pemerintah dan menjadi faktor dalam mengevaluasi kineja pemerintah daerah.

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal ini.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap, aset tetap berupa fasilitas yang disediakan untuk pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan sarana prasaranan yang memadai dapat menarik investor untuk membuka usaha di daerah sehingga tingkat produktifitas akan semakin meningkat. Faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan mendorong untuk melakukan pembangunan ekonomi dnegan mengelola sumber daya ynag ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi daerah. Yang terjadi

padapemerintah daerah pada saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti degan meningkatnya balanja modal, hal ini dapat dilihat dari jumlah besar kecilnya balanja modal yang dianggarkan dengan anggaran belanja daerah.

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio keuangan daerah yang berguna untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

II. MOTEDE

Variable penelitian ada dua variable terikat belaja modal (Y) dan variable bebas pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dan dana alokasi umum (X3). Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis linear berganda, karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dan skala data pada penelitian ini menggunakan rasio serta variabel bebas yang diteliti lebih dari satu variabel. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis data yaitu : uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan koefisien determinasi), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil pengujian asumsi klasik (uji normalitas :analisis grafik memenuhi asumsi normalitas dan analisis statistik menunjukkan bahwa unstandardized residual distribusi normal, hasil multikolinieritas tidak ada masalah, uji autokorelasi sudah bebas dari masalah autokorelasi, tidak terjadi heterokedatisitas.

Hasil analisis persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu Konstanta = - 919188880,098

Jika variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, = 0, maka Belanja Modal sebesar - 919188880,098,

Koefisien X_1 = 19004135,108

Setiap penambahan 1 satuan Pertumbuhan Ekonomi, dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, bernilai nol, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 19004135,108.

Koefisien X_2 = 0,341

Setiap penambahan 1 satuan Pendapatan Asli Daerah, dengan asumsi Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum, bernilai nol, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,341.

Koefisien X_3 = 0,296

Setiap penambahan 1 satuan Dana Alokasi Umum dengan asumsi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah bernilai nol, maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,296.

Hasil koefisien determinasi Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0.820. dengan demikian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, dapat menjelaskan Belanja Modal sebesar 82% dan sisanya yaitu 18% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini seperti SILPA, Dana Alokasi Khusus dan sebagainya.

Hasil pengujian hipotesis uji t (parsial) variabel pertumbuhan ekonomi nilai sign 0,000<0,05 kriteria pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji t (Parsial) variabel pendapatan asli daerahnilai sign 0,000<0,05 kriteria pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji t (parsial) variable dana alokasi umum nilai sign 0,000<0,05 dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji t (simultan) variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum nilai sign 0,000<0,05 kriteria pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja modal.

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap harga saham pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016. Dari hasil pengujian didapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Nilai R Square Belanja Modal dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sebesar 18%.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu. 2005. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424

Arwati, Dini, dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). 498-507

Boediono. 2010. Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE

Darwanto dan Yulia Y. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin. Makassar.

Faridi, M. Z. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS),Vol. 31, No. 1 (June 2011):1-13

Febriana, I. S. dan Sugeng P. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 No.9 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariat dengan Program SPSS*,Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Elex.

Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Hasan, T.I.B. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh.* Journal SAINS Riset, 1(1).

Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jkt. Salemba Humanika.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nordiawan, D. 2012. Anggaran disuatu pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.

Pelealu, A. M. 2014. "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belnja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". Jurnal EMBA, 1191 Vol.1 No.4 Desember, Hal. 1189-1197. ISSN 2303-1174.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang *Klasifikasi Anggaran*.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Nomor 71*, tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 ayat 1

Purwanto, D. 2015. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 11 No 2 September 2015: 263 – 271

Putro, N. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah), Universitas Diponegoro, Semarang.

Santosa, A. B. dan Mohammad A. R. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010).* Universitas Stikubank. Semarang.

Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Penerbit Ghalia Indonesia.

Sugiarthi, N. P. D. E. R. dan N. L. Supadmi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 7(2): 477-495

Sugiyono. 2013.*Metode Penelitian Manajemen*.Bandung:Alfabeta.

Sukirno, S. 2013. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Supriyanto, B. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 106 – 112 ISSN 2339 – 1545

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Tim Pustaka Yustisia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang RI No. 32 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004. Tentang Belanja Modal pasal 1 Ayat 14.

UU No. 33 Tahun 2004. Tentang Dana Alokasi Umum .

UU No. 45 Tahun 2007, *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 13*

Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi.*Yogyakarta: C.V Andi Offset.

www.djpk.depkeu.go.id